



DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
UKM KABUPATEN KAPUAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas perkenan-Nya sehingga Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi & UKM Tahun 2024-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini berpedoman pada PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat guna memberikan informasi penyusunan kebijakan pada waktu mendatang serta dalam rangka mewujudkan Good Governace ditataran Pemerintah Daerah.

Kuala Kapuas, Februari 2025
Kepala Perangkat Daerah

APENDI, S.K.M., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670424 199002 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2024 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kapuas secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan pada Misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kapuas tentang Rencana Strategis SKPD Tahun 2018-2023

Dari sajian capaian kinerja pada Bab III terlihat adanya keberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di atas seratus persen, tetapi ada juga yang capaiannya di bawah seratus persen. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

1 Kedudukan

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas mempunyai tugas Bupati dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Perdagangan, Perindustrian Koperasi, dan UKM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, PerindustrianKoperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas berdasarkan peraturan Perundangundangan;
- b. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kreatif, industry agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika, tekstil dan aneka;
- c. pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri;
- e. pembinaan dan koordinasi kemetrologian dan pengujian mutu barang;
- f. pembinaan dan koordinasi industri makanan, minuman dan kemasan;
- g. pembinaan dan koordinasi pasar rakyat, pasar tradisional dan pasar modern;
- h. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumpengawasan barang beredar dan tertib niaga;
- i. pembinaan dan pengendalian izin industri dan perdagangan;
- j. pembinaan dan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;
- k. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- l. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas maka disusun struktur organisasi. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut.

(Gambar Struktur Organisasi)

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas memiliki ASN sebanyak 29 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas pada Tahun 2024.

Tabel 1.1

Data ASN Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Administrator	5
3	Pengawas	2
4	Fungsional Penyetaraan	11
5	Pelaksana	9
6	PPPK	1
	Total	29

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas.

Tabel 1.2
Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	tidak tersedianya tenaga pendamping industri dan belum terbentuknya kemitraan usaha	1. Tidak tersedianya SDM aparatur pembina yang memiliki kopetensi
			2. program pembinaan belum dapat berjalan maksimal
2	Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, koperasi dan UKM	Lemahnya pengetahuan peaku usaha akan prosedur ekspor dan impor	kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan ekspor impor
		Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya alat Ukur Takar Timbang (UTTP) yang memenuhi standar	masih rendahnya kesadaran pedaganng untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki
		belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian	belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah
		Kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kemitraan usaha dalam berkoperasi	Pengurus Koperasi kurang pro aktif berkonsultasi dengan OPD kabupaten atau Propinsi baik mengenai kelembagaan maupun kemitraan

		Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola koperasi	Pengurus Koperasi kurang memiliki ilmu dan pengetahuan dalam hal tatacara pengelolaan koperasi karena terbatasnya pelatihan yang pernah Pengurus ikuti tentang tatacara pengelolaan Koperasi.
		Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam Penyusunan Laporan Keuangan koperasi	Pengurus Koperasi kurang memiliki ilmu dan pengetahuan dalam hal Penyusunan Laporan Keuangan koperasi karena terbatasnya pelatihan yang pernah Pengurus ikuti tentang Penyusunan Laporan keuangan Koperasi.

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas usaha dalam pengembangan IKM
2. Pengembangan pasar tradisional
3. Pengembangan dan diversifikasi produk unggulan
4. Pengembangan promosi produk unggulan
5. Belum adanya unit kerja kemetrologian legal dan tenaga ahli penera sehingga mengakibatkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera yang sudah diterbitkan tidak dapat dilaksanakan dan PAD belum bisa dipungut secara optimal
6. Pentingnya pengawasan barang
7. Membangun kemampuan kewirausahaan masyarakat kapuas sehingga terbentuk ekonomi kerakyatan yang kuat dan tangguh
8. Membangun jaringan kerjasama antara pemerintah, swasta dan perajin untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.
9. Revitalisasi koperasi dan optimalisasi pengurus dan fungsi koperasi
Peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan berbadan hukum

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A *Visi dan Misi*

Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas adalah *Meningkatkan usaha pertanian Masyarakat, Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah, Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan*

B *Tujuan dan Sasaran*

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Kapuas maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

Tujuan I :

Peningkatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam daerah dengan sasaran :

- I. Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga

Tujuan II :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batanjung dengan sasaran :

- I. Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;

Tujuan III :

Peningkatan kualitas koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif dengan sasaran :

- I. Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas;

Tujuan IV :

Peninngkatan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen dengan sasaran :

- I. Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolagian;

Tujuan V :

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan sasaran :
I. Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi, pelayanan public dan manajemen internal DPPKUKM;

C Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja Tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga	Terwujudnya operasionalisasi UPT Pasar Kota	2
		Jumlah pasar kecamatan yang dibangun	0
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang tertib niaga	50
		Jumlah penerimaan retribusi melalui pengelolaan sarana perdagangan	1.5M
2	Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM dalam 1 tahun	5%
		Persentase jenis dan jumlah produksi IKM berbahan baku local dalam 1 tahun	25%
		Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM dalam 1 tahun	2
		Persentase peningkatan usaha industri yang memiliki legalitas usaha	100%
		Jumlah peningkatan kemampuan pelaku usaha industri	150
3	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.	Persentase penilaian kesehatan koperasi aktif	5%
		Persentase jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi	15%
		Jumlah menejemen usaha koperasi secara digital	6
		Persentase peningkatan jumlah UMKM	2%
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	70%
4	Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrologian	Persentase pengawasan mutu dan komoditi produk perdagangan	40%
		Persentase pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	10%
		Persentase pengaduan konsumen terkait kemetrologian yang ditangani dan ditindaklanjuti	100
5	Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi, pelayanan public dan manajemen internal DPPKUKM	Indeks reformasi birokrasi	Baik
		Indeks pelayanan publik	Baik
		Indeks audit kinerja organisasi	Baik

TARGET MANDATORI			
1	Tercapainya target PAD	Jumlah realisasi target PAD	Rp. 1.575.000.000
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	71 (Predikat BB)
3	Persentase serapan anggaran perangkat daerah	Serapan anggaran Triwulan I	20%
		Serapan anggaran Triwulan II	50%
		Serapan anggaran Triwulan III	80%
		Serapan anggaran Triwulan IV	100%

D

Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 22,562,729,900 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan . Oleh Karena itu, alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 22.630.404.597 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rincian anggaran pada Tahun 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEG	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN
1	2	3	3
I	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	17,724,000	17,724,000
1	<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	17,724,000	17,724,000
a	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	17,724,000	17,724,000
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	78,256,000	78,256,000
1	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	78,256,000	78,256,000
a	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	78,256,000	78,256,000
III	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20,525,000	20,525,000
1	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	20,525,000	20,525,000
a	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20,525,000	20,525,000
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	28,476,000	28,476,000

1	Pendidikan Dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam daerah Kabupaten/Kota	28,476,000	28,476,000
a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	28,476,000	28,476,000
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	250,367,500	250,367,500
1	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	250,367,500	250,367,500
a	Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	250,367,500	250,367,500
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3,047,542,900	3,047,542,900
1	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3,047,542,900	3,047,542,900
a	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3,047,542,900	3,047,542,900
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,623,385,927	7,691,141,147
1	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89,322,000	89,322,000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57,999,000	57,999,000
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,040,000	5,040,000
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,283,000	26,283,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,550,292,000	4,618,145,020
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,498,789,000	4,566,642,020
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,970,000	4,970,000
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	19,651,000	19,651,000
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	7,141,000	7,141,000
e	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,329,000	5,329,000
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	10,320,000	10,320,000
g	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	4,092,000	4,092,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	16,226,000	16,226,000
a	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9,894,000	9,894,000
b	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4,080,000	4,080,000
c	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2,252,000	2,252,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142,970,000	142,970,000
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7,200,000	7,200,000
b	Penngadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24,750,000	24,750,000
c	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21,020,000	21,020,000
d	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90,000,000	90,000,000
5	Administrasi Umum Perangkat daerah	921,221,250	921,123,450
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,999,450	4,999,450

b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	287,000,000	286,902,200
c	Penyediaan Logistik Kantor	100,000,000	100,000,000
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,905,000	32,905,000
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,500,000	6,500,000
f	Penyediaan Bahan/Material	70,008,800	70,008,800
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419,808,000	419,808,000
6	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500,000,000	500,000,000
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000	500,000,000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	744,684,677	744,684,677
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,970,000	2,970,000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,376,000	180,376,000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561,338,677	561,338,677
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	658,670,000	658,670,000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133,110,000	133,110,000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	493,360,000	32,200,000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	493,360,000	493,360,000
VIII	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	66,640,000	66,640,000
1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	66,640,000	66,640,000
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	66,640,000	66,640,000
IX	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	500,452,885	500,452,885
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	500,452,885	500,452,885
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	500,452,885	500,452,885
X	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	7,594,188,000	7,594,178,000
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46,920,000	46,920,000
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	46,920,000	46,920,000
2	Pengendalian Harga, dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	7,547,268,000	7,547,258,000
a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	48,180,000	48,180,000
b	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	7,499,088,000	7,499,078,000
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	313,694,000	313,694,000
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	313,694,000	313,694,000
a	Pameran Dagang Nasional	313,694,000	313,694,000
XI	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	169,405,500	169,405,500
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	169,405,500	169,405,500

a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, Tera Ulang	100,117,500	100,117,500
b	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	34,644,000	34,644,000
c	Penyidikan Metrologi Legal	34,644,000	34,644,000
XII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	455,216,000	455,192,000
1	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	455,216,000	455,192,000
a	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	359,352,000	359,328,000
b	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	95,864,000	95,864,000
XIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,202,324,688	2,202,278,165
1	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	2,202,324,688	2,202,278,165
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	300,000,000	299,958,000
b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,531,224,500	1,531,224,500
c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100,000,523	99,996,000
d	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	271,099,665	271,099,665
XIV	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	62,624,500	62,624,500
1	<i>Penerbitan Izin Usha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	62,624,500	62,624,500
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	62,624,500	62,624,500
XV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	131,907,000	131,907,000
1	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	131,907,000	131,907,000
a	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	44,500,000	44,500,000
b	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Data ke SIINas	87,407,000	87,407,000
		(Rp)	(Rp)
	TOTAL	22,562,729,900	22,630,404,597

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	>=95%	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga	Terwujudnya operasionalisasi UPT Pasar Kota	2	1
		Jumlah pasar kecamatan yang dibangun	0	1
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang tertib niaga	50	50
		Jumlah penerimaan retribusi melalui pengelolaan sarana perdagangan	1,560,000,000	1,345,876,500
2	Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM dalam 1 tahun	5%	6%
		jenis dan jumlah produksi IKM berbahan baku local dalam 1 tahun	25%	28%
		Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM dalam 1 tahun	2	5
		Persentase peningkatan usaha industri yang memiliki legalitas usaha	100%	137%
		Jumlah peningkatan kemampuan pelaku usaha industri	150	100
3	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.	Persentase penilaian kesehatan koperasi aktif	5%	4%
		Persentase jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi	15%	14%
		Jumlah manajemen usaha koperasi secara digital	6	8
		Persentase peningkatan jumlah UMKM	2%	2%
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	70%	112%
4	Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolagian	Persentase pengawasan mutu dan komoditi produk perdagangan	40%	45%
		Persentase pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	10%	15%
		Persentase pengaduan konsumen terkait kemetrolagian yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	75
5	Meningkatnya percepatan reformasi birokrasi, pelayanan public dan manajemen internal DPPKUKM	Indeks reformasi birokrasi	Baik	Baik
		Indeks pelayanan publik	Baik	Baik
		Indeks audit kinerja organisasi	Baik	Baik

TARGET MANDATORI				
1	Tercapainya target PAD	Jumlah realisasi target PAD	Rp. 1.575.000.000	1.345.876.500
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	71 (Predikat BB)	C
3	Persentase serapan anggaran perangkat daerah	Serapan anggaran Triwulan I	20%	30
		Serapan anggaran Triwulan II	50%	50
		Serapan anggaran Triwulan III	80%	70
		Serapan anggaran Triwulan IV	100%	90%

B

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2024. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Tahun 2024:

1. Sasaran Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga

Dalam sasaran Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 50%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja :

Tabel 3.2

Meningkatnya volume, dan nilai dan komoditi ekspor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga	Terwujudnya operasionalisasi UPT Pasar Kota	2	1	50
		Jumlah pasar kecamatan yang dibangun	0	1	100
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang tertib niaga	50	50	100
		Jumlah penerimaan retribusi melalui pengelolaan sarana perdagangan	1,560,000,000	1,345,876,500	86.3
Rata- rata Capaian Kinerja					83%

Pada tahun berjalan, capaian kinerja terhadap sasaran strategis “Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga” menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 83,00%. Capaian ini ditopang oleh realisasi indikator kinerja yang sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Indikator “Persentase pelaku usaha perdagangan yang tertib niaga” berhasil mencapai 100% sesuai dengan target, yang mencerminkan efektivitas kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam mewujudkan tertib niaga. Demikian pula pada indikator “Jumlah pasar kecamatan yang dibangun”, meskipun tidak ditargetkan, berhasil direalisasikan pembangunan satu pasar, yang menunjukkan adanya respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat atau peluang anggaran yang tersedia.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum memenuhi target, yakni “Terwujudnya operasionalisasi UPT Pasar Kota” dengan capaian hanya 50% dari target dua unit. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam proses operasionalisasi, baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan, maupun kesiapan kelembagaan. Selain itu, pada indikator “Jumlah penerimaan retribusi melalui pengelolaan sarana perdagangan”, capaian berada pada angka 86,3% dari target Rp1.560.000.000. Meskipun tergolong baik, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan dan kepatuhan pedagang terhadap pembayaran retribusi.

Tabel 3.3
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan volume, dan nilai dan komoditi ekspor terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra 2026	Realisasi Renstra 2024	Persentase capaian
	Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga	Terwujudnya operasionalisasi UPT Pasar Kota	10	1	10
		Jumlah pasar kecamatan yang dibangun	3	1	33.33
		Persentase pelaku usaha perdagangan yang tertib niaga	70	50	71.43
		Jumlah penerimaan retribusi melalui pengelolaan	4,680,000,000.00	1,345,876,500	28.76

		sarana perdagangan			
--	--	-----------------------	--	--	--

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga adalah sebesar Rp. 8,930,156,885 dengan realisasi sebesar Rp. 8,376,331,409. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut :

Tabel 3.4
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya volume, dan nilai dan komoditi ekspor

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga	83	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	66,640,000	66,144,152	99.26
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	500,452,885	351,455,750	70.23
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	7,594,178,000	7,322,369,000	96.42
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	313,694,000	272,644,525	86.91
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	455,192,000	363,717,982	79.90
			Realisasi Anggaran	8,930,156,885	8,376,331,409	93.79
			Tingkat Efisiensi			6.20

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga dengan Tingkat Efisiensi 6.20 %

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah strategis guna mengoptimalkan capaian terhadap sasaran strategis “Meningkatnya sarana, prasarana dan pengelolaan perdagangan yang tertib niaga” yang pada tahun berjalan menunjukkan capaian rata-rata sebesar 83,00%. Meskipun angka ini menunjukkan kinerja yang cukup baik—terutama karena sebagian besar indikator telah memenuhi target—masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa aspek. Indikator “Persentase pelaku usaha perdagangan yang tertib niaga” yang mencapai 100% mencerminkan efektivitas kegiatan pembinaan dan pengawasan, dan layak untuk terus dipertahankan bahkan direplikasi pada aspek lain. Selain itu, keberhasilan pembangunan satu pasar kecamatan meskipun tanpa target menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas terhadap dinamika kebutuhan

masyarakat, yang bisa dijadikan pola untuk pengembangan responsif berbasis kebutuhan di masa mendatang. Namun, capaian rendah pada indikator “Terwujudnya operasionalisasi UPT Pasar Kota” yang hanya mencapai 50% dari target, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kesiapan infrastruktur, kelembagaan, dan sistem pengelolaan pasar. Perlu dilakukan identifikasi kendala utama—baik dalam aspek teknis, regulatif, maupun koordinatif—serta perencanaan ulang yang lebih realistis dan terukur. Sementara itu, pada indikator “Jumlah penerimaan retribusi melalui pengelolaan sarana perdagangan” yang hanya mencapai 86,3% dari target, perlu didorong peningkatan efektivitas pemungutan retribusi melalui digitalisasi sistem, peningkatan kepatuhan pedagang, serta penguatan fungsi pengawasan dan insentif bagi pengelola pasar. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut, diharapkan kinerja pada tahun mendatang dapat meningkat secara lebih optimal dan merata di seluruh indikator.

2. Sasaran Meningkatnya Jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;

Dalam sasaran Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM; dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 50%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja :

Tabel 3.5
Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;eningkatnya volume, dan nilai dan komoditi ekspor	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM dalam 1 tahun	5%	6%	120
		Persentase jenis dan jumlah produksi IKM berbahan baku local dalam 1 tahun	25%	28%	112
		Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM dalam 1 tahun	2	5	250
		Persentase peningkatan	100%	137%	137

		usaha industri yang memiliki legalitas usaha			
		Jumlah peningkatan kemampuan pelaku usaha industri	150	100	66.67
Rata- rata Capaian Kinerja					137%

Capaian kinerja terhadap sasaran strategis “Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku lokal, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM” pada Kabupaten Kapuas Tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 137%. Dari lima indikator kinerja yang digunakan, empat indikator berhasil melampaui target. Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM mencapai 120% dari target, yang mencerminkan pertumbuhan positif dalam jumlah pelaku usaha baru. Indikator jenis dan jumlah produksi IKM berbahan baku lokal juga menunjukkan capaian sebesar 112%, menandakan adanya peningkatan pemanfaatan potensi bahan lokal dalam kegiatan industri. Keberhasilan yang sangat menonjol terlihat pada indikator promosi dan pemasaran produk IKM dengan capaian sebesar 250%, serta peningkatan usaha industri yang memiliki legalitas usaha sebesar 137%, yang menunjukkan efektivitas program fasilitasi legalitas usaha dan promosi produk lokal.

Namun demikian, capaian pada indikator peningkatan kemampuan pelaku usaha industri masih berada di bawah target, yaitu sebesar 66,67%, dari target 150 pelaku yang ditingkatkan kemampuannya, hanya terealisasi sebanyak 100 pelaku. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program pengembangan kapasitas SDM pelaku IKM, baik dari segi kualitas pelatihan maupun jangkauan sasaran. Secara umum, meskipun terdapat satu indikator yang belum mencapai target, keberhasilan pada indikator lainnya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis, dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.6
Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku lokal, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM; terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra 2026	Realisasi Renstra 2024	Persentase capaian
	Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah)	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM dalam 1 tahun	15	6	40

	produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM;	Persentase jenis dan jumlah produksi IKM berbahan baku local dalam 1 tahun	40	28	70
		Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM dalam 1 tahun	8	5	62.50
		Persentase peningkatan usaha industri yang memiliki legalitas usaha	100	137	137
		Jumlah peningkatan kemampuan pelaku usaha industri	450	100	22.22

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM adalah sebesar Rp. 2,396,809,665 dengan realisasi sebesar Rp. 1,765,355,696. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM

Tabel 3.7
 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku local, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas	137	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,202,278,165	1,626,606,196	73.86
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	62,624,500	46,282,500	73.90
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	131,907,000	92,467,000	70.10

No.	Sasaran dan kemampuan pelaku IKM	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Realisasi Anggaran	2,396,809,665	1,765,355,696	73.65
			Tingkat Efisiensi			26.35

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku lokal, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM 26.35 %

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan beberapa langkah strategis yang berfokus pada konsistensi dan penguatan intervensi, khususnya pada aspek yang masih belum mencapai target. Secara umum, capaian kinerja terhadap sasaran strategis “Meningkatnya jumlah pelaku IKM, pertumbuhan volume (jenis dan jumlah) produksi IKM berbahan baku lokal, promosi dan pemasaran produk IKM serta legalitas dan kemampuan pelaku IKM” telah menunjukkan hasil **sangat baik** dengan capaian rata-rata sebesar 137%. Keberhasilan empat dari lima indikator, termasuk pencapaian luar biasa pada promosi produk (250%) dan legalitas usaha (137%), menjadi bukti bahwa program fasilitasi dan pendampingan telah berjalan efektif.

Namun, capaian indikator peningkatan kemampuan pelaku IKM yang hanya mencapai 66,67% dari target menunjukkan bahwa aspek pengembangan kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan:

1. **Evaluasi menyeluruh** terhadap kualitas, metode, dan materi pelatihan yang telah diberikan.
2. **Perluasan jangkauan program pelatihan**, termasuk kerja sama dengan lembaga pelatihan vokasi, universitas, atau mitra swasta untuk menjangkau lebih banyak pelaku IKM.
3. **Peningkatan efektivitas sosialisasi dan pemetaan kebutuhan pelaku IKM**, agar program lebih tepat sasaran.
4. **Penerapan sistem insentif atau sertifikasi**, yang dapat mendorong partisipasi lebih besar dari pelaku IKM dalam kegiatan pengembangan kapasitas.

Selain itu, keberhasilan pada indikator promosi dan legalitas usaha dapat dijadikan sebagai **best practice** untuk mendukung indikator lainnya, misalnya dengan mengintegrasikan pelatihan dengan kegiatan promosi dan fasilitasi legalitas. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan, kinerja pada seluruh indikator diharapkan dapat ditingkatkan secara merata di tahun mendatang.

3. Sasaran Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.

Dalam sasaran Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas. dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 113%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja :

Tabel 3.8
Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.	Persentase penilaian kesehatan koperasi aktif	5%	4%	80
		Persentase jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi	15%	14%	93
		Jumlah menejemen usaha koperasi secara digital	6	8	133
		Persentase peningkatan jumlah UMKM	2%	2%	100
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	70%	112%	160
		Rata- rata Capaian Kinerja			

Capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas koperasi, kemandirian UMKM, dan digitalisasi di Kabupaten Kapuas menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata capaian sebesar 113%. Dari lima indikator yang diukur, tiga indikator berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator jumlah manajemen usaha koperasi secara digital menunjukkan capaian yang sangat baik sebesar 133%, dari target 6 koperasi yang terdigitalisasi, terealisasi sebanyak 8 koperasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital koperasi di daerah. Capaian luar biasa juga terlihat pada indikator persentase produk UMKM yang memenuhi standardisasi, dengan realisasi 112% dari target 70%, atau setara 160% capaian. Ini mencerminkan

peningkatan kualitas produk UMKM secara signifikan. Sementara itu, persentase peningkatan jumlah UMKM mencapai target 100%, yang menunjukkan stabilitas dalam pertumbuhan jumlah UMKM di wilayah Kab. Kapuas.

Namun demikian, dua indikator lainnya masih belum mencapai target. Persentase penilaian kesehatan koperasi aktif hanya tercapai sebesar 80%, dari target 5% menjadi 4%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mendorong koperasi aktif untuk memenuhi kriteria koperasi sehat. Selain itu, persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi juga belum memenuhi target, hanya mencapai 93%, dari target 15% menjadi realisasi 14%.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan arah yang positif, khususnya dalam aspek digitalisasi dan peningkatan mutu produk UMKM. Ke depan, perhatian lebih perlu diberikan untuk peningkatan kapasitas dan pembinaan koperasi agar mampu memenuhi kriteria sehat serta optimalisasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi. Hal ini penting guna menjaga tata kelola koperasi yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Tabel 3.9
Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas. terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra 2026	Realisasi Renstra 2024	Persentase capaian
	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.	Persentase penilaian kesehatan koperasi aktif	15%	4%	27
		Persentase jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi	65%	14%	22
		Jumlah manajemen usaha koperasi secara digital	10	8	80
		Persentase peningkatan jumlah UMKM	6%	2%	33
		% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	90%	112%	124

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas adalah sebesar Rp. 3,425,167,400 dengan realisasi sebesar Rp. 2,876,155,226. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.10
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas.	113	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	17,724,000	16,359,782	92.30
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	78,256,000	78,169,360	99.89
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	20,525,000	15,651,400	76.26
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	28,476,000	28,270,675	99.28
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	250,367,500	246,585,857	98.49
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3,047,542,900	2,507,477,934	82.28
			Realisasi Anggaran	3,425,167,400	2,876,155,226	83.97
			Tingkat Efisiensi			16.03

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, kemandirian UMKM dan kemampuan digitalisasi Koperasi dan UKM wilayah Kabupaten Kapuas sebesar 16.03 %.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu memperkuat strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas koperasi, kemandirian UMKM, dan transformasi digital. Meskipun capaian rata-rata indikator telah menunjukkan hasil yang baik sebesar 113%, terdapat dua indikator yang masih belum memenuhi target, yaitu penilaian kesehatan koperasi aktif dan pengawasan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan intensitas pembinaan koperasi, khususnya dalam aspek tata kelola, pencatatan keuangan, serta peran aktif anggota. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, pendampingan teknis, dan kerja sama dengan lembaga pendukung koperasi di tingkat provinsi maupun nasional. Di sisi lain, optimalisasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan koperasi juga harus diperkuat melalui peningkatan

kompetensi SDM pengawas, penjadwalan pemeriksaan berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan koperasi secara digital dan berkala.

Keberhasilan pada indikator digitalisasi koperasi dan mutu produk UMKM perlu direplikasi secara lebih luas. Pemerintah daerah dapat memperluas program digitalisasi dengan memberikan pelatihan literasi digital, bantuan teknis, dan insentif kepada koperasi lain yang belum terdigitalisasi. Di samping itu, penguatan mutu produk UMKM melalui fasilitasi sertifikasi, pengemasan, dan pelatihan pemasaran digital harus terus dilanjutkan untuk mendorong daya saing produk lokal. Program-program ini perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang lebih responsif, berbasis data, serta mengintegrasikan umpan balik dari pelaku koperasi dan UMKM. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi tersebut, diharapkan seluruh indikator kinerja dapat ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

4. Sasaran Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgian

Dalam sasaran Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgian. dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 113%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja :

Tabel 3.11
Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgian	Persentase pengawasan mutu dan komoditi produk perdagangan	40%	45%	113
		Persentase pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	10%	15%	150
		Persentase pengaduan konsumen terkait kemetrolgian yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	75	75
Rata- rata Capaian Kinerja					113%

Sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan kepedulian konsumen dan pelaku usaha terhadap kemetrolgian, serta penguatan layanan dan pengawasan di bidang tersebut menunjukkan capaian kinerja yang tergolong baik, dengan rata-

rata capaian sebesar 113%. Dari tiga indikator yang digunakan, dua indikator berhasil melampaui target, sementara satu indikator masih berada di bawah target.

Indikator pengawasan mutu dan komoditi produk perdagangan mencapai 113%, yaitu dari target 40% menjadi realisasi 45%. Hal ini mencerminkan penguatan peran pemerintah daerah dalam menjamin mutu produk yang beredar di masyarakat. Capaian lebih tinggi ditunjukkan oleh pemeriksaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang mencapai 150%, dari target 10% menjadi 15%. Hal ini mengindikasikan peningkatan intensitas pengawasan kemetrolagian secara teknis, yang sangat penting dalam perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi perdagangan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan pada indikator penanganan pengaduan konsumen terkait kemetrolagian, yang hanya tercapai sebesar 75%, dari target 100 pengaduan yang ditangani menjadi 75 pengaduan. Capaian ini menunjukkan perlunya peningkatan responsivitas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat satu indikator yang belum mencapai target, keberhasilan dua indikator lainnya memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kepercayaan dan perlindungan konsumen di bidang kemetrolagian. Ke depan, upaya perlu difokuskan pada penguatan sistem pelaporan, pengaduan, dan tindak lanjut yang lebih cepat dan efektif agar seluruh aspek pelayanan dapat tercapai secara merata dan optimal.

Tabel 3.12
Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolagian terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra 2026	Realisasi Renstra 2024	Persentase capaian
	Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolagian	Persentase pengawasan mutu dan komoditi produk perdagangan	60%	45%	75
		Persentase pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	30%	15%	50
		Persentase pengaduan konsumen terkait kemetrolagian yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	75	75

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgianadalah sebesar Rp. dengan realisasi sebesar Rp. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgian

Tabel 3.12

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgian

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgian	113	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	169,405,500	168,726,330	99.60
			Realisasi Anggaran	169,405,500	168,726,330	99.60
			Tingkat Efisiensi			0.40

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya kepedulian konsumen pelaku usaha, pelayanan dan pengawasan kemetrolgian sebesar 0.40 %.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem pelayanan publik di bidang kemetrolgian, terutama dalam aspek penanganan pengaduan konsumen yang masih belum memenuhi target. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah pengembangan sistem pelaporan dan pengaduan yang lebih responsif dan terintegrasi, misalnya dengan pemanfaatan teknologi digital berupa aplikasi layanan pengaduan, kanal pelaporan berbasis web, atau integrasi dengan media sosial resmi instansi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dalam menangani pengaduan secara cepat dan profesional juga penting dilakukan, termasuk penyusunan SOP penanganan aduan yang jelas, terukur, dan transparan. Diperlukan juga peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi intensif tentang hak-hak konsumen dan saluran pelaporan yang tersedia, agar masyarakat lebih aktif melaporkan permasalahan di bidang kemetrolgian.

Keberhasilan pada indikator pengawasan mutu produk dan pemeriksaan UTP yang melampaui target perlu dipertahankan dan dijadikan best practice. Untuk itu, pemerintah daerah dapat terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta

menambah frekuensi inspeksi lapangan yang berbasis risiko dan potensi pelanggaran. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pengujian dan kalibrasi alat ukur secara berkelanjutan akan mendukung akurasi dan keandalan layanan kemetrollogian. Di sisi lain, penting juga untuk membangun basis data UTTP dan pelaku usaha tertib ukur, guna mendukung pengawasan yang lebih efisien dan terarah.

Secara keseluruhan, peningkatan kinerja bidang kemetrollogian dapat dicapai melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup peningkatan layanan teknis, respons pengaduan, serta partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini akan memperkuat perlindungan konsumen dan menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil, akuntabel, dan berdaya saing.

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten		
1	2	3			4		
		K		Rp	K		Rp
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Aktif	382	koperasi	17,724,000.00	39	koperasi	16,359,782.00
<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koperasi dengan Usaha Simpan Pinjam yang dibina	87	koperasi	17,724,000.00	9	koperasi	16,359,782.00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mematuhi peraturan perundang-undangan	382	koperasi	78,256,000.00	43	koperasi	78,169,360.00
<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan	10	koperasi	78,256,000.00	1	koperasi	78,169,360.00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	88	Koperasi	20,525,000.00	5	koperasi	15,651,400.00
<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki anggota dalam 1 wilayah.	12	Koperasi	20,525,000.00	1	koperasi	15,651,400.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus/Anggota koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	160	Pengurus koperasi	28,476,000.00		orang	28,270,675.00

<i>Pendidikan Dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	98	koperasi	28,476,000.00	1	koperasi	28,270,675.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM	6000	UMKM	250,367,500.00	300	UMKM	246,585,857.00
<i>Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah usaha mikro	150	Usaha Mikro	250,367,500.00	15	Usaha Mikro	246,585,857.00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang tumbuh dan berkembang tangguh dan mandiri	5000	UMKM	3,047,542,900.00	6	UMKM	2,345,627,934.00
<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan	300	Usaha Mikro	3,047,542,900.00	30	Usaha Mikro	2,345,627,934.00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah eksportir	1	eksportir	66,640,000.00		eksportir	66,144,152.00
<i>Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</i>	Jumlah SKA yang Terbit	50	SKA	66,640,000.00	0	SKA	66,144,152.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar yang berfungsi	63	pasar	500,452,885.00	0	pasar	351,455,750.00
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah pasar yang sarananya belum memadai	30	pasar	500,452,885.00	63	pasar	351,455,750.00
PROGRAM STABILITASASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi ketersediaan harga barang	4.2	%	7,594,178,000.00	5.42	%	7,322,369,000.00
<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Data/laporan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam 1 tahun anggaran	48	data	46,920,000.00		data	46,920,000.00
<i>Pengendalian Harga, dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam 1 tahun anggaran	240	laporan	7,547,258,000.00	4	laporan	7,275,449,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah jenis komoditas ekspor	1	jenis	313,694,000.00	0	jenis	272,644,525.00
<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Negara Tujuan Ekspor	3	negara	313,694,000.00	0	negara	272,644,525.00
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pelaku usaha yang melakukan pelayanan sesuai aturan yang berlaku	400	Pelaku Usaha	169,405,500.00	50	Pelaku Usaha	168,726,330.00
<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	Jumlah Hasil Tera dan tera ulang yang telah dilaksanakan	400	tera	169,405,500.00	50	tera	168,726,330.00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas akses pasar	1	pelaku usaha	455,192,000.00		pelaku usaha	363,717,982.00
<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi promosinya	1	pelaku usaha	455,192,000.00		pelaku usaha	363,717,982.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	7,691,141,147.00		%	7,009,743,324.00
<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	89,322,000.00		%	89,089,762.00
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Keuangan	100	%	4,618,145,020.00	100	%	4,219,910,628.00
<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah</i>	Jumlah Laporan Asset	1	dokumen	16,226,000.00	1	dokumen	12,920,000.00
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	142,970,000.00	100	%	141,175,300.00
<i>Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	Persentase administrasi kantor yang terpenuhi	100	%	921,123,450.00	100	%	879,141,050.00

<i>Pengadaan Barang Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	%	500,000,000.00	100	%	423,200,000.00
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Penunjang Kantor yang Terpenuhi	100	%	744,684,677.00	100	%	631,982,495.00
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Pemeliharaan aset kantor	100	%	658,670,000.00	100	%	612,324,089.00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Sumber daya industri yang bertumbuh	5	Dokumen	2,202,278,165.00		Dokumen	1,626,606,196.00
<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	3	dokumen	2,202,278,165.00		dokumen	1,626,606,196.00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah pelaku industri formal	2	Dokumen	62,624,500.00	2	Dokumen	46,282,500.00
<i>Penerbitan Izin Usha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Industri yang memiliki ijin Usaha	1	Industri	62,624,500.00	1	Industri	46,282,500.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Database Industri	2	dokumen	131,907,000.00	2	dokumen	92,467,000.00
<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Industri yang memiliki ijin Usaha	1	industri	131,907,000.00	1	industri	92,467,000.00

BAB IV PENUTUP

A *Kesimpulan*

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024, secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik dengan sebagian besar indikator melampaui atau mencapai target. Beberapa indikator bahkan menunjukkan kinerja yang sangat baik seperti legalitas usaha IKM (137%), jumlah promosi dan pemasaran produk IKM (250%), serta standar produk UMKM (112%). Namun, terdapat pula beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti operasionalisasi UPT Pasar Kota (50% dari target), peningkatan kemampuan pelaku usaha industri (67%), dan pengawasan serta pemeriksaan koperasi (93%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja secara keseluruhan cukup positif, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek penguatan kelembagaan dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, IKM, koperasi, dan kemetrolagian.

B *Pemecahan Masalah*

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi & UKM Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Optimalisasi Perencanaan dan Anggaran

Memastikan perencanaan program dan penganggaran dilakukan secara realistis, berdasarkan kemampuan pelaksanaan dan prioritas kebutuhan, agar target seperti operasionalisasi UPT Pasar Kota dan peningkatan kapasitas pelaku industri dapat tercapai tepat waktu.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pendampingan

Menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan bagi pelaku IKM, koperasi, dan UMKM agar peningkatan kemampuan pelaku usaha lebih optimal dan berdampak terhadap pertumbuhan usaha mereka.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait dan Swasta

Membangun kemitraan dengan lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk mendukung pembiayaan, pemasaran, legalitas usaha, dan adopsi teknologi digital terutama dalam pengelolaan koperasi dan UKM.

4. Percepatan Transformasi Digital

Mengembangkan sistem informasi digital untuk pendataan, evaluasi kinerja, dan manajemen koperasi/UKM secara real-time guna mendukung transparansi, efisiensi, dan perluasan akses pasar.

5. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

Meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap alat UTTP serta mutu dan komoditi produk perdagangan dengan melengkapi sarana pengujian dan memperkuat koordinasi lintas bidang agar target pengawasan dapat tercapai secara menyeluruh.

6. **Penguatan Infrastruktur dan Sarana Perdagangan**

Mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi pasar serta operasionalisasi sarana perdagangan lainnya melalui sinergi antar Perangkat Daerah dan dukungan pemerintah pusat maupun provinsi.